

Judul : KPU Mau Terapkan E-Voting : Untuk Pemilih Luar Negeri
Tanggal : Rabu, 17 Juni 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Untuk Pemilih Luar Negeri

KPU Mau Terapkan E-Voting

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengkaji penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting untuk pemilih di luar negeri pada Pemilu 2029. Rencana ini bagian dari upaya modernisasi sistem kepemiluan sekaligus evaluasi atas pelaksanaan Pemilu 2024, termasuk pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia.

KETUA KPU Mochammad Afifuddin mengungkapkan, pengembangan sistem informasi kepemiluan menjadi salah satu isu strategis yang tengah dibahas KPU. Menurutnya, pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan keniscayaan yang harus mulai dipersiapkan sejak sekarang.

"Pengembangan ini dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas dan teknologi yang secara praktik tidak bisa kita hindari. Kita harus semakin beradaptasi dengan penggunaan teknologi informasi," ujar Afif, saat Rapat Kerja bersama Komisi II DPR di Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

KPU memperkirakan kebutuhan anggaran untuk pengembangan sistem informasi kepemiluan mencapai sekitar Rp 12,5 miliar. Namun, implementasi program ini masih sangat bergantung pada hasil revisi Undang-Undang Pemilu.

"Perkiraan kebutuhan mencapai sekitar Rp 12,5 miliar. Ini salah satu yang kami dorong, tetapi tentu masih membutuhkan diskusi lebih lanjut dan pengaturan dalam undang-undang," katanya.

Afif menambahkan, opsi penerapan e-voting untuk pemilih luar negeri pada Pemilu 2029 masih berupa gagasan yang memerlukan persetujuan pembentuk undang-undang sebelum dapat direalisasikan.

"E-voting misalnya untuk Pemilu 2029 di luar negeri. Tetapi sekali lagi, ini bergantung pada apakah pembentuk undang-undang menyetujui penggunaan e-voting dalam pemungutan suara di luar negeri," ujarnya.

Karena itu, anggaran yang diajukan saat ini belum mencakup pengembangan maupun penggunaan aplikasi e-voting. Jika nantinya disetujui, KPU memerlukan alokasi anggaran tersendiri

untuk pengembangannya.

"Pada intinya, berangkat dari refleksi kami di KPU dan pembelajaran bersama, kami ingin pelaksanaan pemilu ke depan berjalan lebih baik dari yang sudah sudah," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung mendorong agar wacana penerapan e-voting dikaji secara serius sebagai bagian dari modernisasi demokrasi Indonesia menuju Pemilu 2029.

Menurut Doli, perkembangan teknologi digital yang semakin pesat membuat Indonesia perlu mulai mempertimbangkan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemilu. Salah satunya melalui sistem e-voting yang dinilai memiliki sejumlah keunggulan.

"E-voting berpotensi meningkatkan efisiensi, mempercepat proses penghitungan suara, menekan biaya penyelenggaraan pemilu dalam jangka panjang, serta meminimalkan kesalahan administratif," kata Doli, dalam diskusi bertajuk Menimbang E-Voting di 2029, di Kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta, (2/6/2026).

Doli menilai, kedekatan genera-

si muda dengan teknologi digital menjadi salah satu alasan penting untuk mulai membahas transformasi sistem pemilu ke arah yang lebih modern.

"Generasi muda saat ini sangat dekat dengan teknologi digital. Karena itu, kita perlu memikirkan berbagai terobosan yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat tanpa mengurangi kualitas dan integritas demokrasi," ujarnya.

Meski demikian, Doli mengingatkan bahwa penerapan e-voting tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Menurutnya, diperlukan kajian komprehensif dan persiapan matang agar sistem tersebut benar-benar siap diterapkan.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu menyebut sejumlah tantangan yang harus diantisipasi. Mulai dari keamanan siber, perlindungan data pribadi, potensi peretasan, hingga kesiapan infrastruktur teknologi di seluruh wilayah Indonesia.

"Diskusi tentang e-voting bukan hanya soal mengganti metode memilih. Yang paling penting adalah memastikan setiap suara rakyat tetap aman, transparan, akuntabel, dan mendapatkan kepercayaan publik," tegas anggota Komisi II DPR tersebut.

Doli juga menilai pembahasan mengenai kemungkinan penerapan e-voting perlu dimasukkan dalam agenda revisi Undang-Undang Pemilu agar seluruh aspek regulasi dapat dipersiapkan sejak dini.

"Kalau kita bicara soal apakah akan menerapkan e-voting atau tidak, ini merupakan bagian dari isu yang harus diselesaikan dalam revisi Undang-Undang Pemilu," katanya.

Selain regulasi, kesiapan infrastruktur dinilai menjadi syarat utama. Menurut Doli, pemerataan jaringan internet dan ketersediaan listrik masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan pemerintah.

"Infrastruktur jaringan internet kita masih banyak pekerjaan rumah. Jangankan jaringan internet, jaringan listrik di beberapa wilayah juga masih perlu ditingkatkan," ujarnya.

Dia menambahkan, literasi digital masyarakat juga menjadi faktor penting dalam transformasi sistem pemilu berbasis teknologi. Karena itu, penerapan e-voting harus dibarengi dengan kesiapan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. ■ BSH